

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan sebelumnya tentang Efektivitas Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Pembangunan Desa Lamu Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo, maka dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut :

1. Fungsi BPD dalam pengawasan pembangunan belum dilaksanakan secara efektif sebagaimana amanah peraturan perundang-undangan, karena bentuk pengawasan selama ini, belum melembaga atau tidak rutin dilakukan, hanya jika ada waktu dan kesepakatan antara anggota BPD dan Pemerintah Desa, serta belum ada sistem yang terbangun dalam pengawasan tersebut. Selain itu, BPD belum dapat mengukur dampak langsung kegiatan pembangunan, belum melakukan pemantauan secara terus menerus mulai dari proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, belum menyusun laporan hasil pengawasan pelaksanaan pembangunan serta belum melakukan koreksi atas penyimpangan-penyimpangan yang timbul dalam kegiatan pembangunan.
2. Kendala atau hambatan yang dihadapi BPD dalam pengawasan pembangunan di Desa Lamu Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo antara lain (a) Belum Adanya Sistem Pengawasan; (b) Keterbatasan Kemampuan SDM BPD Di Bidang Pengawasan; (c) Masih Kuatnya Budaya "Apatis" Dari Masyarakat; (d) Sikap Kepala Desa Yang Sedikit Dominan; (e) Terbatasnya Anggaran Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan BPD.
3. Upaya pemerintah desa dalam meningkatkan kapasitas BPD dalam pengawasan pembangunan di Desa Lamu Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo antara lain :
 - a. Peningkatan Sarana Dan Prasarana Lembaga BPD dan

b. Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) Bagi Anggota BPD.

B. Saran

Berdasarkan hasil-hasil temuan yang dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat diberikan beberapa saran antara lain :

1. Sebaiknya pemerintah baik pusat, provinsi dan kabupaten menerbitkan produk hukum yang mengatur SOP pengawasan oleh BPD terhadap pembangunan sehingga pengawasan tersebut melembaga, rutin dilakukan, serta membangun permanen sistem pengawasan pembangunan desa.
2. Pemerintah Kabupaten diharapkan menyediakan anggaran bagi BPD untuk yang dapat digunakan dalam operasional organisasi sehingga diharapkan lembaga BPD dapat menjalankan fungsinya secara efektif dan efisien sesuai amanaah peraturan perundang-undangan.
3. Pemerintah hendaknya secara berkesinambungan melakukan upaya-upaya peningkatkan kapasitas anggota BPD dibidang pengawasan pembangunan berupa Diklat-Diklat Teknis pengawasan sehingga pengawasan pembangunan dapat berjalan efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Ashshofa, Burhan. 2007. *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta : Jakarta.

Ali, Faried. *Hukum Tata Pemerintahan dan Proses Legislatif Indonesia*. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

- Effendy, Onong U, 2009, *Pengertian Komunikasi Massa*. Jakarta: Rajawali Pers
- Georgopolous dan Tannenbaum, 2005, *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga
- Haryanto dkk, 2007, *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Pertama. Universitas Diponegoro.
- Handyaningrat, Soewarno, 2008, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, CV Haji Masagung, Jakarta.
- Jayadinata, Johara. T dan Pramandika I.G.T. 2006. *Pembangunan Desa Dalam Perencanaan*. Bandung: Penerbit ITB
- Kurniawan, Agung. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Pembaruan. Yogyakarta.
- Martoyo, Susilo. 2007, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi 5, Cetakan Pertama., BPFE Yogyakarta.
- Maringan Masri, Simbolon, 2004. *Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Mahmudi, 2005, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Miftah Adhi Ikhsanto Dan Amirudin, *Fungsi Negara Dalam Pengelolaan Kepentingan Publik*, Bahan Kuliah, Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM Yogyakarta – Indonesia.
- Mukti Fajar ND Dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
- M. Yusuf Effendi, 2011, *Bandan Permusyawaratan Desa (BPD) Pasca Berlakunya UU No. 32 Tahun 2004 (Kajian Terhadap Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa Di Kab. Jember.)* Jurnal Hukum Argumentum, Vol 11-1 Desember 2011.
- Ngatiyat Prambudi, 2014, *Keistimewaan Undang-Undang Desa Terbaru No. 6 Th. 2014*, <http://kartonmedia.blogspot.com/> di akses tanggal 30 April 2014.
- Udak, Blasius Urikame (editor), 2003, *Model Pelatihan, Penguatan Parlemen Desa Panduan Untuk Fasiltator Otonomi Desa*, Yayasan Peduli Sesama, Kupang.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1994, *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia, Jakarta.
- Steers, Richard M. 2005. *Efektivitas Organisasi*. Terjemahan Magdalena Jamin. Erlangga. Jakarta.
- Suharto , Edi. 2009. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. PT Refika Aditama: Bandung.

Sumodiningrat, Gunawan. 2009. *Mewujudkan Kesejahteraan Bangsa Menanggulangi Kemiskinan dengan Prinsip Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta : PT. Alex Media Komputindo.

Susanto, Azhar. 2008. *Sistem Informasi Akuntansi*. Salemba Empat. Jakarta.

Suriadi, Agus. 2005. *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat(Diktat)*, USU, Medan

Simbolon, Maringan Masri. 2004. *Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Sutoro, Eko dan Abdul Rozaki, 2005, *Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa*, IRE press Yogyakarta.

Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, Jakarta: UI-Press.

Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, CV. Alfabeda, Bandung

Sumber Saporin, 2008, *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintah Desa*, Ghalia Indonesia.

Tatang M. Amirin, 2000, *Menyusun Rencana Penelitian*, Cet.3, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Widjaja, HAW. 2003. *Otonomi Desa*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

INTERNET

www.presidentri.go.id/DokumenUU.php/151.pdf, diakses 15 Mei 2014

www.hukumonline.com/.../uu-no-6-tahun-2014-desa, diakses tanggal 16 Mei 2014
anakdesa12.blogspot.com/2012/.../pengertian-desa.ht, diakses 16 Mei 2014.

www.bimteknasional.info/2014/.../sosialisasi-uu-no-06, diakses tanggal 30 April 2014

www.google.com/pengertian pemerintahan, diakses 24 April 2014.

<http://henyyluantini.blogspot.com/2012/10/masyarakat-kota-dan-desa-dalam.html>, diakses tanggal 01 Juni 2014.

<http://amalia-tirta.blogspot.com/2012/01/pengawasan.html>, diakses tanggal 01 Juni 2014.

UNDANG- UNDANG

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa